

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG PAJAK ATAS
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA**

**SELAMAT SODUGAON CARL FRANSISCUS
203300416123**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2024**

**LEGAL PROTECTION FOR TAX BEARER FOR THE IMPLEMENTATION
OF TAX COLLECTIONS IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 19 OF 2000
CONCERNING TAX COLLECTION BY FORCED LETTER**

SELAMAT SODUGAON CARL FRANSISCUS

NPM. 203300416123

*This thesis was submitted as one of the conditions to obtain a bachelor's degree
of Law*



BACHELOR'S PROGRAM

STUDY PROGRAM FOR LEGAL SCIENCE

FACULTY OF LAW

2024

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Selamat Sodugaon Carl Fransiscus

Nomor Pokok Mahasiswa : 203300416123

Jurusan / Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

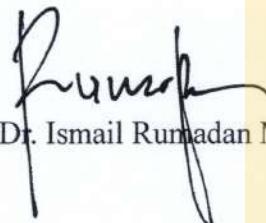
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGUNG PAJAK
ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal: 29 Februari 2024 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 5 Maret 2024

Penguji:

Ketua



Dr. Ismail Rumadan M.H.

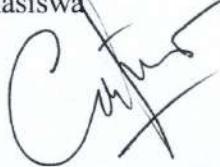
Anggota

Dr. Ummu Salamah., S.Ag., S.H., M.A.

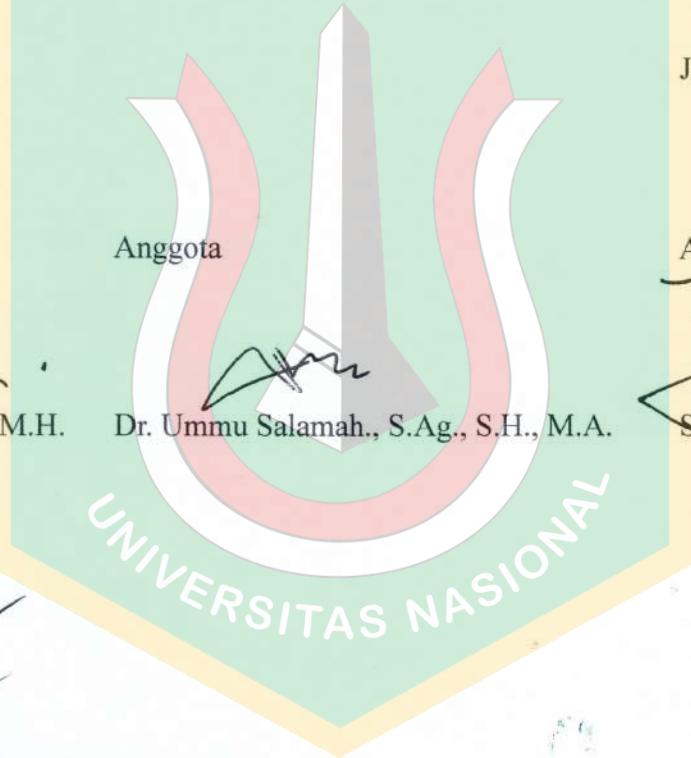
Anggota

Surajiman S.H., M.H.

Mahasiswa



Selamat Sodugaon Carl Fransiscus



UNIVERSITAS NASIONAL

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji pada tanggal 29 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **84** dan predikat (**memuaskan, sangat memuaskan, cumlaude**).

Jakarta, 29 Februari 2024

Dekan

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M. Si.

Pembimbing

Surajiman S.H., M.H.

Ketua

Dr. Ismail Rumadan M.H.
UNIVERSITAS NASIONAL
Dr. Ummu Salamah., S.Ag., S.H., M.A.

Anggota

Surajiman S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Selamat Sodugaon Carl F
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 06 September 1977
Nomor Induk Mahasiswa : 203300416123
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Nasional
Alamat : Jl. H. Harun No. 14 F Tanjung Barat
Nomor Handphone : 081297178825

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinal kecuali kutipan yang telah saya masukan dengan menggunakan catatan kaki. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 19 Februari 2024



Selamat Sodugaon Carl F

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU HUKUM, SKRIPSI 19 FEBRUARI 2024

A. Nama Penulis	: Selamat Sodugaon Carl F
B. Nomor Pokok Mahasiswa	: 203300416123
C. Judul Skripsi	: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDAN NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA)
D. Jumlah Halaman	: 84
E. Isi Abstrak	: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan bagaimana perlindungan hukum bagi penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan pajak ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan utang pajak dengan surat paksa yaitu pertama, pada dasarnya penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, kedua, terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, pejabat dapat melakukan tindakan penagihan pajak, ketiga, pelaksanaan tahapan penagihan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak dengan surat paksa, keempat, pelaksanaan tahapan penagihan pajak dilakukan terhadap penanggung pajak dengan mempertimbangkan urutan prioritas. Perlindungan hukum dalam bidang pajak yang sangat dirasakan oleh wajib pajak/penanggung pajak antara lain dengan diberikannya kelonggaran kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk melakukan angsuran/penundaan pembayaran utang pajak, melakukan pembetulan ketetapan pajak dan adanya pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang timbul dari utang pajak tersebut. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus melaksanakan kewajiban bayar pajaknya dengan nilai dan waktu yang ditentukan.
F. Daftar Pustaka	: Buku, Peraturan Perundang-Undangan dan Jurnal.
G. Nama Dosen Pembimbing	: Surajiman, SH., M. Hum.

ABSTRACT

DEGREE PROGRAM OF NATIONAL UNIVERSITY LEGAL SCIENCE

STUDY PROGRAM THESIS, 19 FEBRUARI 2024

- A. Writer's Name** : Selamat Sodugaon Carl F
- B. Student Identification Number** : 203300416123
- C. Thesis Title** : TAX BEARER LEGAL PROTECTION FOR COLLECTION IMPLEMENTATION LAW NUMBER 19 OF 2000 CONCERNING TAX COLLECTION WITH FORCED LETTERS IS REVIEWED WITH REGARD TO TAXES.
- D. Number of Page** : 84
- E. Abstract Content** : The primary source of state revenue, which is utilized to pay for state expenses, is taxation. is a crucial industry for Indonesian tax income. The question posed by this study is: In light of Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection with Forced Letters, how is the application of tax debt collection using forced letters going and what legal safeguards are in place for taxbearer in relation to the application of Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection by Force Letter in terms of tax collection. The study's findings demonstrate the following aspects of the use of forced letters in tax debt collection: (1) tax collection is essentially carried out in the event that the taxpayer fails to pay the tax debt and associated costs; (2) tax collectors have the authority to take collection action against the taxbearer; and (3) the implementation of the tax collection stages is done in compliance with applicable laws and regulations. Fourth, taking priority into account, the tax bearer is subjected to the application of the tax collecting stages. The study's findings demonstrate how tax debt collection through forced letters is implemented. Specifically, tax collection is essentially carried out in three ways: (1) tax collection is carried out if the taxbearer does not pay the tax debt and associated costs; (2) officials may take collection action against the taxbearer; and (3) the implementation of the tax collection stages is carried out in compliance with the laws and regulations pertaining to tax collection through forced letters. Fourth, the priority order is taken into account while implementing the tax collecting steps on the tax bearer.
- F. Reference** : Book, legislation and journal
- G. Thesis Supervisor's Name** : Surajiman, SH., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA”.**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua beserta seluruh keluarga yang telah membesar dengan penuh cinta, dan kasih sayang, memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan dan perjuangan hingga penulis mencapai perguruan tinggi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

4. Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Ibu Erma Defiana S.H., M.H selaku Ketua Program Kekhususan Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Nasional
6. Bapak Surajiman, SH., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya masih sempat membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing penulis secara akademik dan nasihatnya selama tiga setengah tahun masa perkuliahan.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional yang sudah banyak memberikan bantuan secara teknis selama menempuh perkuliahan.
9. Terima kasih kepada Istri ku terkasih dan anak-anak ku tersayang, Abang, Kakak dan Luwy yang telah memberikan dukungan moril dan doa serta kasih sayang yang tidak putus-putusnya dan mau kehilangan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
10. Terima kasih kepada Orang Tua ku, Bapak dan Mamak yang terhormat untuk doa dan pengertiannya selama perkuliahan ku sehingga terkadang absen menemani pengobatan Bapak.
11. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih untuk sahabat sekaligus rekan-rekan Theresia, Richika, Ispan, Tiara, Baly dan seluruh teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional, yang selama tiga setengah tahun Bersama merasakan pahit-manis yang ada di Fakultas Hukum. Ucapan

terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu. Penulis hanya bisa mendoakan semoga jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan balasan yang setimpal.



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
1. Kerangka Teori	7
2. Kerangka Konseptual	17
E. Metode Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II	28
TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PAJAK	28
A. Pengertian Pajak	28
B. Fungsi Pajak	30
C. Sumber-sumber Penerimaan Negara.....	31
D. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	40
E. Asas Pemungutan Pajak	43
F. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak	46
BAB III.....	50
UTANG PAJAK DAN SURAT PAKSA	50
A. Utang Pajak	50
B. Timbulnya dan Berakhirnya Utang Pajak	51
C. Penagihan Pajak	54
D. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	56
BAB IV	64

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG PAJAK ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.....	64
A. Penagihan Utang Pajak Dengan Surat Paksa Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	64
B. Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Pajak Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.	69
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
A. Buku	81
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	83
C. Internet.....	83

